

DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR

IMPACT OF LOCALIZATION CLOSING ON COMMERCIAL (PSK) AND SOCIAL ECONOMIC WORKERS OF THE COMMUNITY AROUND

Murdiyanto

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530

Email: murdiyanto471@yahoo.com HP 08164261742

Naskah diterima 21 September 2019, direvisi 18 Oktober 2019, disetujui 12 November 2019

Abstract

Pucuk and Langit Biru localization is a localization of prostitutes in Jambi City which was closed by the local government on October 13, 2014, closing localization refers to the Regional Regulation of Jambi City Number 2 of 2014 concerning Eradication of Prostitution and Immoral Action. The selection of the research area is based on the fact that the Localization of Payo Sigadung (Pucuk) became a legend as the largest localization area in Jambi which is a tourist area esek-esek which is quite well known in Sumatra. The Regional Government closed the two localization because it was considered to have a negative impact on CSWs and the socio-economic conditions of the surrounding communities. This study aims to determine the effect of closing localization on commercial sex workers and the socio-economic conditions of the surrounding community. The research is descriptive qualitative, which aims to obtain information or an objective picture of the impact of the closure of localization on sex workers and the socio-economic life of the surrounding community. The informants were the Head of the Jambi City Social Service, the Head of the Jambi City Social Rehabilitation Division, the RT Chairperson, the Sahabat Foundation Chair, CSWs, pimps / pimps, localization security, parking attendants, motorcycle taxis, food / beverage sellers, and traders. Data collection is done by using interview, observation, and document review techniques. The data that has been successfully collected, then analyzed qualitatively descriptive and described in narrative. The results showed that the closure of the two localization in Jambi City had an impact on the lives of CSWs and the socio-economic conditions of the people who experienced changes in livelihoods. Social impacts in the form of health, security and religious life of the community in the localization environment. Economic conditions have an impact on the decline or even loss of income as business people in the localization environment. Low education makes it difficult for people to find work outside the lokalisasi. The role of the relevant government agencies in closing this localization includes the Ministry of Social Affairs, Jambi Provincial Social Service, and Jambi City Social and Manpower Office. The Ministry of Social Affairs has the role of providing social assistance programs in the form of compensation funds, the Jambi Provincial Social Service has the role of handling pimps or pimps to be empowered or transferred professions and businesses, and the Jambi City Social and Manpower Office has a role to deal with various parties affected by closing localization.

Keywords: Localization, Commercial Sex Workers, Social, Economic.

Abstrak

Lokalisasi Pucuk dan Langit Biru merupakan lokalisasi wanita tuna susila di Kota Jambi yang sudah ditutup oleh pemerintah daerah setempat pada tanggal 13 Oktober 2014, penutupan lokalisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Pemilihan daerah penelitian berdasarkan pada kenyataan bahwa Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) menjadi legenda sebagai kawasan lokalisasi terbesar di Jambi yang merupakan kawasan wisata esek-esek yang cukup dikenal di Sumatera. Pemerintah Daerah menutup kedua lokalisasi tersebut karena dinilai berdampak negatif terhadap PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi terhadap PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi ataupun gambaran secara objektif mengenai dampak akibat penutupan lokalisasi terhadap pekerja seks dan kehidupan

sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagai informannya adalah Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Jambi, Ketua RT, Ketua Yayasan Sahabat, PSK, germo/mucikari, keamanan lokalisasi, juru parkir, ojek, penjual makanan/minuman, dan pedagang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diuraikan secara narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditutupnya kedua lokalisasi yang ada di Kota Jambi tersebut berdampak pada kehidupan PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan dalam hal matapencaharian. Dampak sosial berupa kesehatan, keamanan, dan kehidupan keagamaan masyarakat di lingkungan lokalisasi. Kondisi ekonomi berdampak pada turunnya ataupun bahkan hilangnya pendapatan sebagai pelaku bisnis di lingkungan lokalisasi. Pendidikan yang rendah, membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan di luar lokalisasi. Peran instansi pemerintah yang terkait dalam penutupan lokalisasi ini meliputi Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Kementerian Sosial berperan sebagai pemberi program bantuan sosial berupa dana kompensasi, Dinas Sosial Provinsi Jambi berperan menangani para germo atau mucikari untuk diberdayakan atau alih profesi dengan diberi keterampilan maupun usaha, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi berperan untuk menangani kepada berbagai pihak yang terdampak dengan penutupan lokalisasi.

Kata Kunci: Lokalisasi, PSK, Sosial, Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya sejumlah rumah bordil (tempat tertentu yang didiami oleh para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melakukan pelacuran). Penunjukkan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan dari pemerintah daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan izin kepada germo atau mucikari mengadakan border atau tempat pelacuran. Sebuah lokalisasi biasanya dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan, olahraga, rekreasi, serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Seseorang yang memutuskan menjadi pelacur atau pekerja seks komersial sebenarnya bukan merupakan tujuan dalam mencari nafkah, melainkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan lain yang lebih utama, karena mereka tidak pernah bercita-cita menjalani profesi sebagai penjaja seks dan mau menjalani profesinya karena berbagai faktor. Terjunnya seorang perempuan ke dunia prostitusi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK adalah keterbatasan ekonomi, sehingga seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya

Kementerian Sosial pada tahun 2012 mencatat ada 161 lokalisasi di Indonesia, sebagian di antaranya sudah ditutup. Data tersebut dikutip detikcom, Jumat (20/6/2014), ada 19 provinsi di Indonesia yang memiliki lokalisasi. Di setiap provinsi jumlahnya bervariasi, di antaranya hanya

terdapat satu lokalisasi saja namun ada juga yang jumlahnya puluhan. Jawa Timur menempati ranking pertama dalam jumlah lokalisasi dengan 53 tempat yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Seiring dengan waktu, terdapat 20 lokalisasi yang ditutup. Khusus di Kota Surabaya, dari 6 tempat lokalisasi yang terdaftar semuanya sudah ditutup, terakhir adalah Dolly dan Jarak. Kabupaten Banyuwangi yang pernah memiliki 8 lokalisasi, kini juga sudah habis. Di Jawa Barat, dari 13 lokalisasi hingga tahun 2012 baru 2 yang ditutup, yakni Saritem dan Gardujati. Namun setelah penutupan, aktivitas prostitusi masih terlihat di lokalisasi tersebut (Kemensos: 2014).

Jumlah PSK dan tempat prostitusi (lokalisasi) di Indonesia sebelum ada kebijakan penutupan oleh Kementerian Sosial cenderung meningkat (Sumber Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial: 12 Maret Tahun 2015). Menurut data Kemensos (2015), jumlah PSK di Indonesia sebanyak 64.435 orang yang menyebar di 168 lokalisasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Oktober 2016), jumlah lokalisasi sebanyak 143 dengan penghuni (PSK) sebanyak 19.726 orang yang menyebar ke seluruh Indonesia. Kondisi lokalisasi yang belum ditutup sebanyak 18, penutupan dilakukan oleh pemerintah daerah 54, sedangkan penutupan dengan *support* penuh Kementerian Sosial sebanyak 62 lokalisasi (Dirjen Rehsos: 2016).

Tidak ada jaminan ditutupnya tempat lokalisasi maupun dilegalkan, maka aktivitas prostitusi akan lenyap. Namun dengan upaya menutup lokalisasi dan memberikan pengganti

serta membina eks PSK agar mereka keluar dari lubang hitam tersebut tetap dilakukan. Penyelesaian masalah lokalisasi kembali sangat tergantung dari kekuatan daerah yang mengeluarkan Perda. Sayangnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur sanksi PSK, mucikari/germo, dan lelaki hidung belang sebagai penggunaannya (Fetry Wuryasti: 2016).

Purnomo dan Siregar dalam Dampak Penutupan Lokalisasi (dalam Hartini Retnaningsih: 1983) mengemukakan, sejumlah pernyataan resmi mengumumkan jumlah perempuan yang telah meninggalkan kompleks, dianggap menuju “jalan yang lurus”, tetapi kebanyakan hanya pindah kompleks di kota lain dimana para germonya bisa membanggakan adanya “pendatang baru”. Penutupan lokalisasi belum tentu berarti menyelesaikan masalah pelacuran secara komprehensif, karena dapat berdampak pada pelacuran di tempat lain.

Situasi terkini para pekerja seks adalah pekerja seksual yang pindah lokasi atau pindah ke beberapa kota untuk mencari klien. Ada pula beberapa yang masih ada di lokalisasi yang sama tetapi menerima klien di lokasi lain. Secara umum, pekerja seksual mencari lokasi baru seperti di pinggir jalan, rumah kontrakan atau tempat kos-kosan. Lokasi baru tersebut lebih rentan terhadap razia dan tindak kekerasan. Penutupan lokalisasi menjadi sebuah proyek dan tidak ada mantaince yang jelas terhadap keputusan tersebut. Setelah lokalisasi ditutup razia menjadi lebih sulit untuk dilakukan, karena transaksi seks dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tersamar. Petugas kesehatan juga semakin sulit agar pekerja seksual datang atau mendatangi untuk mengakses layanan kesehatan. Setelah dilakukan penutupan, kondom diakses dari toko atau warung sehingga sulit dilakukan pemantauan kepada pekerja seksual, apakah mereka secara rutin dan berkelanjutan sudah konsisten menggunakan kondom.

Penutupan lokalisasi harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Secara umum, dengan menutup lokalisasi dan memulangkan para pekerja seks maka permasalahan akan selesai. Tidak ada lagi prostitusi di daerah tersebut, sehingga penyebaran penyakit kelamin dapat berkurang.

Melakukan penutupan secara tergesa-gesa tanpa perhitungan malah dapat menimbulkan dampak berkepanjangan. Para pekerja seks perempuan (PSP) dapat saja bekerja secara terselubung sehingga sulit dideteksi lagi. Mereka sulit diberikan pengobatan sehingga dengan mudah menularkan berbagai penyakit.

Dampak lainnya adalah hilangnya pendapatan dari para pekerja seks, mengingat sebagian besar di antara mereka adalah tulang punggung keluarga dan lebih rentan mendapatkan kekerasan di lokasi yang baru (baik dari customer maupun petugas). Kekerasan seringkali dialami oleh pekerja seks ketika razia, seperti adanya pungutan liar ataupun kekerasan secara fisik. Pola pencarian layanan kesehatan pada pekerja seks juga mengalami perubahan. Setelah dilakukan penutupan, pekerja seks menjadi sulit untuk mengakses kondom maupun pelicin, selain itu juga menjadi enggan melakukan pemeriksaan rutin karena takut terdeteksi masih melakukan pekerjaan seks. Hal tersebut seringkali mengharuskan opsi untuk melakukan pendistribusian kondom dan pelicin secara diam-diam, sehingga tidak dapat dihitung sebagai capaian. Dari penutupan, banyak pihak yang ikut hidup dari keberadaan pekerja seks di lokalisasi merasa dirugikan, antara lain: masyarakat pelaku ekonomi, tukang cuci, usaha warung minuman dan makanan, pemilik kos-kosan, tukang ojek, tukang becak, keamanan, tukang parkir, bahkan tukang kredit.

Sampai saat ini belum ada formula yang pas dan ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi. Menutup lokalisasi pun tidak menjadi jalan keluar yang efektif, karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Istilah PSK sebagai penjual layanan seks komersial, seharusnya juga ada istilah pria tuna susila sebagai pengguna layanan seks komersial. Jika kemudian sebutannya pekerja seks komersial juga ada istilah pengguna seks komersial. Artinya baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk label tidak bermoral dan tuna susila. Jika paradigmanya demikian, bukan tidak mungkin apabila pemakai liar juga harus dikejar-kejar, ditangkap, diadili, bahkan

jika perlu dikirim ke panti rehabilitasi. Hal ini akan berdampak secara psikologis kepada konsumen atau calon konsumen untuk berpikir ulang apabila ingin jajan.

Dari hasil penelitian penutupan lokalisasi ternyata justru menimbulkan permasalahan yang lain. Berbagai permasalahan tersebut menimpa baik kepada para pekerja seks, layanan kesehatan maupun masyarakat sekitar yang terpengaruh secara ekonomi, karena sudah tidak bisa lagi menawarkan jasanya sebagai tukang cuci, tukang parkir, tukang ojek, serta usaha warung makanan dan minuman. Penutupan lokalisasi, pekerja seks mau tidak mau harus berpindah tempat yang masih memungkinkan bagi mereka untuk menjalani profesi sebagai pekerja seks. Mereka berpindah ke jalanan, panti pijat, kos-kosan, warung remang-remang, atau pindah ke lokasi yang benar-benar baru. Tidak sedikit pekerja seks yang kemudian kehilangan pendapatan, padahal tidak jarang dari mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seringkali di tempat mangkal yang baru, pekerja seks mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik. Problematika ini menjadi lebih sulit untuk ditangani, karena mereka kemudian tersebar ke mana-mana dan tidak terorganisir.

Kebijakan penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berdampak pada dua hal: Pertama, penutupan bisa berdampak positif pada pemerintah setempat, karena memperoleh kepercayaan penuh kembali dari masyarakat dalam melakukan penataan kota. Kedua, penutupan akan menimbulkan istilah 'mati satu tumbuh seribu' yang menyebar di berbagai tempat. Sebab, banyak kota yang menutup lokalisasi namun justru berdampak pada menyebarnya penyakit masyarakat di sudut kota. Aktivitas prostitusi sebenarnya bukan hanya pada pelanggan dan pekerja seks, namun sudah menjadi milik masyarakat lokalisasi. Lokalisasi memberikan keuntungan pada kelompok masyarakat lokalisasi, seperti: pekerja seks, mucikari/germo, calo, tukang parkir, tukang ojek, pemilik warung, pedagang, dan pengurus kampung ikut merasakan rezeki dari aktivitas prostitusi ini. Persoalan dan fenomena lokalisasi tampaknya sudah terlalu mengakar. Itulah realita fenomena sosial kehidupan lokalisasi, bagaikan

dua sisi mata uang yang berlawanan, tidak bisa dilihat dari satu sisi, namun harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam upaya untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi, maka perlu dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah "Bagaimanakah dampak ditutupnya lokalisasi, terutama terhadap pekerja seks, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diketahuinya dampak penutupan lokalisasi terhadap pekerja seks, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian terutama bagi Dirjen Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Tuna Susila Kementerian Sosial sebagai salah satu bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang ada relevansinya dengan program penutupan lokalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memperoleh informasi ataupun gambaran secara objektif mengenai dampak akibat penutupan lokalisasi terhadap pekerja seks dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk memecahkan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan ataupun melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil penelitian selanjutnya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang adekuat terhadap fakta yang ditemukan (Suharsimi Arikunto: 1993).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu salah satu daerah pada tingkat kota/kabupaten yang memiliki lokalisasi, namun telah dilakukan penutupan oleh pemerintah daerah setempat. Atas dasar hal tersebut, maka lokasi penelitian ditentukan di Kota Jambi. Informan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang mengetahui atau secara langsung maupun tidak langsung terdampak dari penutupan lokalisasi. Berbagai pihak tersebut meliputi: Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Ketua Yayasan Sahabat, konselor adiksi, ketua RT di lokalisasi,

eks bagian keamanan lokalisasi, tukang ojek, pemilik usaha warung, Ketua RT di lokalisasi, tukang parkir, pekerja seks, geromo/mucikari, dan pemilik usaha laundry.

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain: a. Wawancara: Penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara mendalam adalah wawancara, sehingga jenis instrumen pengumpul data bersifat terbuka, yaitu memberi kesempatan kepada informan untuk memberikan informasi secara luas dan panjang lebar mengenai berbagai hal yang ditanyakan berdasarkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang mereka miliki. Dengan demikian, diperoleh berbagai data dan informasi yang akan diolah berdasarkan kebutuhan dan relevansi dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Digunakannya teknik ini, di samping pelaksanaan wawancara dapat berjalan lancar, diharapkan akan memberikan berbagai masukan, khususnya yang berkaitan dengan dampak terhadap penutupan lokalisasi. Dengan demikian, akan diperoleh berbagai data yang relevan dan menunjang dengan kegiatan penelitian yang dilakukan. b. Observasi: Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui secara objektif mengenai kondisi lokalisasi dan aktivitas para penghuninya, sehingga dapat melengkapi informasi yang telah diperoleh melalui teknik wawancara. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih banyak dan mendalam, khususnya yang berkaitan dengan dampak penutupan lokalisasi. c. Telaah dokumen: Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat melengkapi data yang telah diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh wilayah di tanah air akan bebas prostitusi pada tahun 2019. Upaya untuk mencapai target tersebut, Kemensos telah melakukan penancangan Gerakan Nasional bebas Prostitusi sejak tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

pernyataan atau komitmen dari seluruh dinas sosial (dinsos) dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia, untuk menutup lokalisasi prostitusi di daerah masing-masing yang dinyatakan pada tanggal 29 Januari 2016. Kementerian Sosial akan mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang akan menutup tempat pelacuran. Saat ini terdata masih ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi, dan masih tersisa sebanyak 100, salah satu daerah yang telah ditutup adalah di Kota Jambi (Republika: 17/2/2016). Dalam menangani masalah prostitusi, setidaknya harus memberantas tiga akar permasalahan terlebih dahulu. Ketiga permasalahan tersebut adalah kemiskinan, kebodohan, dan moralitas. Pemerintah telah menyiapkan beragam program untuk penanganan bagi para wanita bekas dari lokalisasi prostitusi di Indonesia.

1. Lokalisasi WTS di Kota Jambi

Di Kota Jambi terdapat dua lokalisasi yang telah ditutup oleh pemerintah daerah setempat pada tanggal 13 Oktober 2014, penutupan lokalisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Kedua lokalisasi tersebut adalah Payo Sigadung (Pucuk) dan Langit Biru.

2. Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk)

Nama pucuk dilekatkan untuk lokalisasi yang memiliki nama asli Payo Sigadung, apakah untuk menggambarkan lokasi ini berada di perbukitan. Lokalisasi Payo Sigadung atau biasa disebut Pucuk menjadi yang terbesar dan tertua di Jambi. Menurut salah satu sejarawan Jambi, Junaedi T Noor, lokalisasi Pucuk sudah ada sejak dekade 1970-an. Lokasinya di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo. Daerah itu disebut Pucuk karena letaknya lumayan jauh dari tengah kota. Nama Pucuk tetap menjadi icon prostitusi di Jambi, sejak berdiri lebih kurang 48 tahun yang lalu, hampir seluruh penduduk Jambi mengetahui pucuk sebagai tempat prostitusi di Kota Jambi. Munculnya isu penutupan pucuk akan merebak, yang pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro penutupan

memiliki alasan bahwa lokasi ini sudah tidak strategis, karena sudah berada dalam kota sekaligus berdampingan dengan perkampungan masyarakat dan menginginkan Kota Jambi bebas prostitusi. Kelompok yang kontra tidak ingin para PSK berkeliaran di tengah kota untuk mencari pelanggan di jalanan, mereka menginginkan agar lokalisasi dipindahkan ke luar kota.

Semua alasan tersebut rasional, pada awalnya letak lokalisasi ini adalah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk, namun seiring perjalanan waktu kawasan pucuk ini terus berkembang untuk tempat pemukiman masyarakat biasa seiring kemudian perkembangan kota semakin pesat, sehingga ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memindahkan lokalisasi ke luar kota. Jumlah penghuni (PSK) lebih kurang 700 orang (Desember, 2010; jambimedical.blogspot.com), namun data terakhir sebelum dilakukan penutupan terdata sebanyak 280 PSK. Ditutup atau tidak, pucuk akan tetap menjadi legenda sebagai kawasan lokalisasi terbesar di Jambi yang merupakan kawasan wisata esek-esek yang cukup dikenal di Sumatera.

Masuk ke lokalisasi Payo Sigadung harus melewati gerbang khusus dengan penjaga super seram. Sebelum masuk akan ada kayu palang yang akan menghalangi dan harus bayar uang Rp 2.000 baru bisa masuk. Rumah di lokalisasi ini sangat padat, ada yang bagus, sedang, dan ada yang jelek. Pucuk termasuk area strategis, berada di tengah kota namun sedikit terisolasi. Pada malam hari, para perempuan akan dandan menunggu pelanggan di rumah masing-masing atau di sekitar lokalisasi. Uniknya, siang hari merekapun tetap beraksi namun tidak dandan secara berlebihan. Jalan di lokalisasi Pucuk terdiri dari beberapa gang. Gang utama bisa dilalui kendaraan roda empat dan gang kecil hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Semua gang didereti rumah berisikan PSK, rumah di gang utama biasanya lebih megah dan mampu menampung banyak anggota. Berbeda dengan rumah yang berada di gang kecil ada yang sifatnya permanen dan semi permanen.

Adanya rencana penutupan lokalisasi dari Pemerintah Kota Jambi, banyak para penghuni lokalisasi prostitusi di Payo Sigadung atau yang

lebih populer dikenal dengan Pucuk, ada beberapa pihak yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Jambi. Tuntutan mereka tetap sama, yakni tidak setuju dengan keputusan Pemerintah Kota Jambi yang ingin menutup lokalisasi pelacuran di Jambi. Para demonstran terdiri dari mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan perwakilan organisasi ini berorasi di luar pekarangan kantor DPRD Kota Jambi. Warga tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan menyimpang dari norma sosial dan norma agama. Mereka rata-rata beralasan, masuk ke dalam dunia hitam karena faktor ekonomi, sulit mencari uang atau pekerjaan di luar kerja sebagai pezina. Di samping itu, profesi sebagai mucikari hasilnya cukup menggiurkan dibandingkan dengan profesi apapun. Mereka enggan angkat kaki dari lokalisasi karena bisnis esek-esek hasilnya cukup menggiurkan. Betapa tidak, peredaran uang di lokalisasi Payo Sigadung dalam sehari bisa mencapai angka Rp 1 miliar. Banyaknya rumah dan gedung mewah milik mucikari di lokalisasi Pucuk ini berindikasi bahwa bisnis barang haram ini cukup menggiurkan (The Jambi Times.com,8/2013).

Menurut Dadi (ketua RT) Payo Sigadung (sejak tahun 1980) Kelurahan Rawasari, dulu sewaktu masih ramai peredaran rupiah di lokalisasi yang sudah berumur puluhan tahun itu bisa mencapai lebih dari Rp. 2 miliar seharusnya. Kalau sekarang agak sepi, tetapi sesepi-sepinya Rp. 500 juta pasti ada. Penghasilan mucikari jika mempunyai "anak buah" banyak, dalam satu hari bisa mendapat Rp. 10 juta. Penghasilan PSK-nya pun cukup mencengangkan. Jika PSK itu merupakan primadona di tempatnya, penghasilannya dalam satu bulan bisa mencapai Rp. 30 juta hingga Rp. 40 juta. Pengakuan salah seorang PSK, dalam seharusnya dia bisa melayani tamu 5-8 orang. Kalau lagi sepi paling 5 tamu. Selain dari tarif melayani tamu, mereka juga mendapat tip dari menemani tamunya minum dengan kisaran Rp. 100 ribu dan ada yang lebih.

3. Lokalisasi WTS Langit Biru

Lokalisasi Langit Biru masuk wilayah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur. Lokalisasi ini memang tidak sebesar dan terkenal layaknya Pucuk. Selain lebih kecil, lokalisasi ini juga

dikenal sebagai tempat “buangan” bagi pekerja seks yang sudah uzur. Apabila dibandingkan dengan Lokalisasi Payo Sigadung, Langit Biru dapat dikatakan lebih kecil dan kondisi rumahnya juga jauh berbeda. Besarnya sewa rumah setiap kali transaksi cukup membayar sebesar 20 ribu rupiah, sehingga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang iseng karena cukup terjangkau. Jumlah PSK sebelum dilakukan penutupan sebanyak 39 orang, sebagian besar berusia antara 29 sampai 40 tahun dengan tingkat pendidikan tidak tamat sekolah dasar dan tamat sekolah dasar. Pada umumnya PSK yang ada di lokalisasi ini merupakan pindahan dari Pucuk karena kalah bersaing dengan sesamanya.

Kementerian Sosial tidak pernah berhenti untuk memberikan konsultasi dan memberi bantuan kepada para kepala daerah untuk menutup lokalisasi yang ada di kota-kota di Indonesia. Walikota Jambi pernah berkonsultasi dengan Kemensos untuk menutup dua lokalisasi di Jambi, yakni lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru. Kemensos pun mengapresiasi apa yang dilakukan setelah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang penutupan lokalisasi tersebut, dan atas hasil kajian dari tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait. Kemensos mendukung penuh program- yang dilakukan oleh Pemkot Jambi untuk menutup lokalisasi. Selain itu, akan dilakukan pembagian tugas secara proporsional dan saling menguntungkan terkait pemulangan, jaminan hidup serta pengembangan potensi untuk beralih profesi para penghuni lokalisasi.

Besarnya bantuan sosial atau dana kompensasi bagi eks-WTS ternyata antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang menerima sebesar 4.800.000 rupiah sebanyak 22 orang (73,33 persen) dan sebesar 2.000.000 rupiah sebanyak 8 orang (26,67 persen). Hal ini bisa terjadi, karena pada waktu pendataan hanya terdaftar sebanyak 30 orang, ternyata ada yang tidak mau didata atau bahkan melarikan diri. Pada waktu pencairan dana bantuan sosial akan diserahkan, ternyata yang datang lebih dari 39 orang, sehingga diambil kebijakan yang datang belakangan hanya diberi separo untuk pemerataan, jangan sampai ada beberapa orang yang sudah datang tidak mendapatkan bantuan sosial

kompensasi, karena hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial di antara mereka.

Keberadaan lokalisasi telah memunculkan atau membuka pekerjaan baru bagi masyarakat setempat yaitu adanya peningkatan ekonomi seperti pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, tukang parkir, petugas keamanan, dan penjual jamu. Sebagian masyarakat terutama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan lokalisasi tersebut memiliki persepsi positif terhadap PSK di Lokalisasi. Adanya lokalisasi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena rata-rata keluarga yang bekerja di lokalisasi berasal dari golongan ekonomi rendah.

Lokalisasi dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar, ketika banyak masyarakat sekitar bergantung hidupnya pada lokalisasi, maka sangat jelas dampaknya ketika lokalisasi itu ditutup. Harus disadari bahwa prostitusi terbangun karena logika bisnis, yaitu adanya *supply and demand*, dimana para pelacur membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual. Para PSK tetap dapat beroperasi selama masih ada pelanggan yang menginginkan, meskipun harus bekerja di luar wilayah lokalisasi. Prostitusi akan hilang eksistensi apabila tidak ada lagi pengunjung yang datang untuk melakukan transaksi.

Setuju ataupun tidak, faktanya bahwa keberadaan lokalisasi jelas memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat lingkungan sekitar. Ada juga yang berpendapat bahwa dengan adanya praktek prostitusi di suatu lokasi, maka keadaan roda ekonomi masyarakat sekitar lokasi tersebut lebih berjalan secara dinamis, karena banyak masyarakat yang mengambil kesempatan dengan mengais rejeki/ bermatapencaharian (membuka warung, jual rokok, menjadi tukang parkir, keamanan, pedagang asongan, tukang parkir, atau bekerja di tempat prostitusi sebagai petugas kebersihan) di tempat lokasi bisnis prostitusi tersebut.

Warga yang terkena dampak langsung dari penutupan lokalisasi adalah tukang ojek, penjual sayur dan tukang cuci, tukang parkir, tukang becak, penjaga keamanan, pedagang asongan, dan sebagainya. Setelah penutupan lokalisasi

masyarakat sekitar lokalisasi tersebut terkena dampaknya. Dampak yang terjadi dari penutupan lokalisasi mempunyai dua sisi terjadi pada masyarakat, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi berupa pendapatan dan pendidikan masyarakat serta dampak sosial berupa kesehatan, keamanan, dan kehidupan keagamaan masyarakat di lingkungan lokalisasi.

Awal mula yang memiliki ide penutupan lokalisasi di Kota Jambi ini adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai satu tahun sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 16 Februari 2014. Di Kota Jambi terdapat dua lokalisasi yang ditutup pada tanggal 13 Oktober 2014, yaitu Lokalisasi Langit Biru dengan jumlah PSK sebanyak 39 orang dan Payo Sigadung sebanyak 280 orang.

Alasan penutupan lokalisasi antara lain: a) letak lokalisasi yang dahulu berada di luar kota, sekarang sudah masuk daerah perkotaan, b) Atas usulan atau masukan dari tokoh masyarakat dan warga masyarakat sekitar bahwa keberadaan lokalisasi sangat mengganggu dan berdampak negative terhadap para generasi muda dan anak di sekitarnya. c) Lingkungan lokalisasi adalah daerah yang religius, dimana banyak berdiri tempat-tempat ibadah dan sering adanya kegiatan yang bersifat keagamaan. Dengan ditutupnya dua lokalisasi tersebut, diharapkan para PSK dapat dipulangkan ke daerahnya masing-masing termasuk yang berasal dari daerah Kota Jambi. Sedangkan bagi mereka yang dipulangkan ke daerah luar Jambi, antara lain meliputi:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi
Pemulangan Eks PSK ke Daerah Asal

No	Daerah Asal Eks WTS	f	%
1	Palembang	2	9,09
2	Bogor	3	13,63
3	Bandung	4	18,18
4	Cirebon	2	9,09
5	Panerokan	1	4,54
6	Cikampek	1	4,54
7	Lampung	1	4,54
8	Banten	1	4,54
9	Tasikmalaya	1	4,54

10	Indramayu	5	22,73
11	Subang	1	4,54
Jumlah		22	100,00

Sumber data: Dinas Sosial Kota Jambi (2014)

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (22,73 persen) eks PSK dipulangkan ke daerah asalnya yaitu di Indramayu, selanjutnya sebesar 18,18 persen ke Bandung, 13,63 persen ke Bogor, 9,09 persen ke Palembang dan Cirebon, serta yang lainnya 4,54 persen ke Panerokan, Cikampek, Lampung, Banten, dan Tasikmalaya. Pemulangan ini menggunakan alat transportasi bus (carter) dengan memanfaatkan dana transport pemulangan. Agenda pemulangan eks PSK ke daerah asal ini didampingi oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi, dan dari Satpol PP Kota Jambi, sedangkan biaya perjalanan dinas dibebankan kepada SKPD masing-masing. Dengan pemulangan para eks PSK ini diharapkan mereka tidak lagi bekerja yang selama ini digeluti, namun dapat membuka usaha dan alih profesi di daerah asal masing-masing dengan memperoleh pengawasan dari keluarga.

4. Dampak Penutupan Lokalisasi Kota Jambi

Setiap strategi akan terdapat proses di dalam pelaksanaannya, dimana akan ada kendala yang terjadi. Begitu pula penutupan lokalisasi, jelas membuat panik dan bingung beberapa orang yang memang menggantungkan hidupnya di lokalisasi. Ada yang lebih memilih berhenti dan memulai hidup baru dengan membuka usaha lain, adapula yang masih tetap bertahan membuka usaha yang memang sudah dilarang dengan cara sembunyi-sembunyi. Kendala yang dialami adalah tidak adanya peluang kerja yang dapat dikerjakan dan dibuka di daerah tersebut, sudah banyak warung, toko kelontong yang buka dan tidak memungkinkan lagi jika membuka kembali toko kelontong baru. Jika ingin bekerja di pabrik atau tempat lain, kendala utamanya adalah ijazah dari tingkat pendidikan rendah yang dimiliki oleh setiap eks pekerja lokalisasi, tidak adanya keahlian khusus yang menjadi penghambat dalam membuka peluang kerja baik secara individu atau di tempat lain (Laily Masrurin Nisa: 2016).

Banyak kalangan yang menilai penutupan lokalisasi hanya pencapaian program pemerintah

daerah setempat, tanpa mempertimbangkan permasalahan sebenarnya, yakni lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan angkatan kerja, tidak akan pernah selesai hanya dengan menutup lokalisasi. Bahkan ketidakmampuan dari para wanita harapan (PSK) untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan menyebabkan kegagalan pencapaian positif dari kebijakan ini. Selain menutup matapencaharian wanita harapan, pedagang makanan dan pemilik yang berada di daerah maupun di sekitar lokalisasi juga merasakan dampak, sehingga harus menutup pula usaha mereka karena sepi pembeli. Pemberian kompensasi dan keahlian tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dinilai tidak menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga mereka. Tidak jarang, banyak yang yakin mantan PSK ini akan kembali menekuni profesi lamanya dan menjadi tidak terkontrol akibat tidak ada tempat mangkal yang resmi, sehingga kejadian HIV/AIDS dimasa mendatang jauh lebih banyak. Hal ini dilakukan karena rasa peduli sekaligus prihatin dengan kehidupan warganya yang berada di daerah lokalisasi.

Pendapat tersebut berkembang seiring dengan tidak terjaminnya kesehatan terutama dari penularan HIV/AIDS di dalam dan luar daerah lokalisasi, kurangnya pendidikan anak di daerah tersebut dan perkembangan lokalisasi yang semakin pesat dalam membuka tempat pelacuran baru. Dengan tujuan memasyarakatkan PSK, penutupan lokalisasi akan memberikan banyak sekali manfaat tidak hanya bagi masyarakat secara umum, namun juga para pemain di lokalisasi yang hingga kini menyangsikannya. Penyelesaian masalah sosial, peningkatan perekonomian masyarakat, penataan kota, hingga penanggulangan dan penurunan masalah kesehatan terutama reproduksi dalam beberapa tahun dapat tercapai bila kebijakan pemerintah ini terealisasi. Penutupan lokalisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi, ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yaitu munculnya praktik prostitusi liar. Sedangkan pemerintah setempat belum memiliki antisipasi atas dampak penutupan itu. Sementara di kalangan mucikari, berniat akan bertahan di lokalisasi.

Terdapat beberapa fakta yang ditemukan di lapangan terkait situasi setelah penutupan tempat-tempat lokalisasi di Kota Jambi. Pada umumnya para pekerja seks tidak beralih profesi, melainkan hanya berpindah ke lokasi baru di daerah lain (kos-kosan, tempat pijat, jalanan, atau warung remang-remang). Pekerja seks sebagian besar mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan lain. Tanpa didukung oleh keterampilan secara memadai dan kemauan untuk berubah dari para pekerja seks, besar kemungkinan mereka akan bertahan menjalankan pekerjaannya. Walaupun lokalisasi telah ditutup oleh pemerintah daerah, namun tidak sedikit para pekerja seks melakukan kegiatan prostitusi secara ilegal dan sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang secara terang-terangan menerima langganan pada siang hari.

Para pekerja seks akan selalu ada, namun yang diperlukan adalah upaya pembinaan bukan pembinasan. Selama ini yang menjadi faktor tumbuhnya kawasan prostitusi seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi. Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan berdasarkan cara yang benar inilah yang perlu dikembangkan programnya. Sekarang ini yang sedang berkembang adalah bisnis seks terselubung seperti cewek orderan, panti pijat esek-esek, dan café yang menyediakan layanan seks. Kegiatan prostitusi tidak langsung ini sulit untuk dibina sehingga program kesehatan sulit untuk menjangkaunya, karena mereka bukan pekerja seks yang mudah dideteksi. Inilah masalah perilaku sakit masyarakat yang perlu dibenahi. Mengubah perilaku masyarakat tentunya tidak mudah, namun upaya pembinaan perlu terus dilakukan mulai lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dampak lain yang terjadi dari penutupan lokalisasi mempunyai dua sisi terjadi pada masyarakat yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial berupa kesehatan, keamanan, dan keagamaan masyarakat serta dampak sosial berupa pendapatan dan pendidikan masyarakat. Penutupan lokalisasi sebenarnya ada dua dampak yaitu yang sifatnya positif dan negative, namun dalam penelitian ini yang dikaji lebih lanjut adalah dari segi negative penutupan lokalisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak

sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh para pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di daerah lokalisasi. Pelaku usaha mengeluhkan tingkat pendapatan mulai menurun, hal itu juga dirasakan oleh pemerintah daerah setempat, geromo atau mucikari, tukang ojek, usaha warung, tukang parkir, salon kecantikan, pedagang asongan, keamanan, dan laundry atau tukang cuci.

Pekerja Seks Komersial

Para Pekerja Seks Komersial (PSK) pada dasarnya tidak menyukai bekerja sebagai pekerja seks. Salah seorang pekerja seks, sebut saja S misalnya, mengatakan: "*siapa sih yang mau kerja beginian kalo gak terpaksa*". Pada umumnya mereka tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun tanggungan anak dan keluarga karena ketiadaan lahan, ketiadaan ijazah sekolah untuk melamar pekerjaan atau ketiadaan modal untuk berusaha membuka warung dan usaha lainnya. Terhadap rencana penutupan lokalisasi, pekerja seks dan warga yang membuka usaha perekonomian di lingkungan lokalisasi berharap agar pemerintah menjamin pekerjaan yang sanggup menghidupi mereka.

Pemberian uang kompensasi Rp. 5.050.000,- dari Kementerian Sosial sudah dianggap mampu sebagai solusi bagi setiap pekerja seks untuk membangun usaha keterampilan atau modal bertahan hidup menunggu datangnya pekerjaan baru. Tetapi pada realitanya bagi pekerja seks, besarnya kompensasi tersebut masih jauh dari kenyataan, pengalaman dari beberapa penutupan lokalisasi yang pernah terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya. Besarnya uang kompensasi tidak dapat dipakai berusaha dalam jangka waktu lebih dari setahun, karena akhirnya merugi. Beberapa orang pekerja seks yang bekerja di perusahaan umumnya hanya bertahan satu tahun karena dikontrak dan mendapat upah sangat kecil.

Keterampilan yang disalurkan pemerintah juga selalu berujung pada tidak terjualnya hasil dari keterampilan karena pemerintah tidak menjaminkannya. Pada akhirnya, sebagian besar pekerja seks kembali lagi melakukan perdagangan seks dengan tersembunyi dan tersebar, sehingga

berkonsekuensi pada kekerasan lebih lanjut terhadap perempuan pekerja seks. Permasalahan ini telah menjadi fakta yang menyertai setiap penutupan lokalisasi, tanpa adanya jaminan yang cukup dari pemerintah. Dengan demikian, uang kompensasi hanyalah suatu harapan untuk memperpanjang hidup lebih lama tanpa solusi secara mendasar dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi alasan munculnya para pekerja seks.

Penutupan lokalisasi tidak sertamerta ditutup begitu saja, setelah dilakukan penutupan jangan sampai para penaja seks tersebut hanya akan berpindah ke lokasi lain. Seharusnya, sebelum ditutup dilakukan pendampingan secara intensif kepada para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari/geromo. Setelah dilakukan penutupan lokalisasi, mereka akan berada dan tersebar di mana-mana tanpa terdeteksi. Hal itu akan sangat mengkhawatirkan, terutama terkait dengan penyebaran penyakit HIV/AIDS. Setelah lokalisasi ditutup secara otomatis akan banyak PSK yang bergerak sendiri, kita tidak tahu dimana menemukan mereka yaitu bergantung pada informasi resmi ataupun panggilan telepon (Yusup Ependi: 2016).

Pemerintah Daerah Setempat (RT)

Terdampak lain dengan ditutupnya lokalisasi adalah aparat pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintahan tingkat RT. Lokalisasi Payo Sigadung merupakan tempat terjadinya transaksi aktivitas prostitusi yang menempati dalam satu wilayah RT. Sebelum lokalisasi ditutup, beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan lokalisasi rumah bordil dan lainnya selalu memberi uang kas untuk dana RT yang rata-ratanya mencapai sebanyak Rp. 30.000.000,- setiap bulan. Dana kas yang telah terkumpul tersebut sering dipergunakan untuk keperluan pembangunan fisik di lingkungan daerahnya dan untuk kesejahteraan warga. Setelah lokalisasi ditutup, secara otomatis pihak RT kehilangan pemasukan kas yang nilainya cukup lumayan besar. Sampai saat ini pihak RT belum mendapatkan ganti yang lain terhadap pemasukan kas dari lokalisasi tersebut.

Germo atau Mucikari

Penanganan terhadap berbagai pihak yang terkena dampak ditutupnya lokalisasi ini sebenarnya sudah ada pembagian tugas dan wewenang antar instansi pemerintah terkait. Kementerian Sosial berperan memberi bantuan dana kompensasi, Dinas Sosial Provinsi Jambi menangani terhadap mucikari atau germo, dan Dinas Sosial Kota Jambi menangani terhadap berbagai pihak yang terkena dampak karena penutupan lokalisasi. Namun yang sudah berjalan baru mengenai dana kompensasi dari Kementerian Sosial, sedangkan yang lainnya penanganan terhadap mucikari/germo dan pihak-pihak terdampak belum memperoleh penanganan. Rencana semula bahwa para mucikari/germo ini akan diberi keterampilan atau keahlian sebagai bekal untuk mencari pekerjaan ataupun membuka usaha untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat hidup secara wajar di masyarakat.

Tukang Ojek

Tidak lepas pula para ojek yang terkena dampak terhadap ditutupnya lokalisasi, mereka kehilangan mata pencaharian pokok sebagai tukang ojek karena sudah jarang sekali yang menggunakan atau memanfaatkan jasanya baik dari para pelanggan lokalisasi dan lebih-lebih dari para pekerja seks komersial. Sebelum lokalisasi ditutup, seringkali para PSK yang ada di lokalisasi menggunakan jasa para ojek (pada umumnya wanita) untuk mengantar keluar lokalisasi, baik untuk kepentingan ke pasar, berbelanja kebutuhan sehari-hari (toko swalayan), makan, ataupun ke tempat teman dan sanak saudaranya. Setiap kali para PSK menggunakan jasa para ojek ini, mereka sering menjamin mengenai bahan bakarnya, makan/minum, selain ongkos sebagai ojek yang memang seharusnya diterima. Para ojek sangat senang apabila jasanya digunakan oleh para penghuni lokalisasi ini, karena nantinya akan memperoleh ongkos yang lebih dibandingkan apabila peggungannya adalah orang lain pada umumnya.

Pemilik Warung

Begitu pula dengan keberadaan pengusaha toko atau warung yang berada di lingkungan

lokalisasi, secara langsung dan terasa dampak ditutupnya lokalisasi terhadap usaha mereka. Sebelum lokalisasi ditutup, banyak barang dagangan yang laris dan laku setiap harinya terutama pada malam hari seperti kopi, rokok, indomie, minuman, parfum, dan perlengkapan untuk mandi. Namun setelah ditutupnya lokalisasi kondisi warung sekarang menjadi terlihat sepi dari pengunjung, bahkan jarang sekali yang terlihat duduk atau nongkrong di depan warung sambil menikmati jajannya. Solusi yang direncanakan dari Dinas Sosial Kota Jambi yaitu dengan memberikan keterampilan dan keahlian yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mencari mata pencaharian ataupun dalam usaha sebagai alih profesi mereka.

Juru Parkir

Pihak lain yang terkena dampak dari penutupan lokalisasi adalah para juru parkir yang setiap harinya mengatur kendaraan baik roda dua maupun roda empat bagi para tamu lokalisasi. Menurut salah satu informan, dana yang masuk dari hasil mengelola parkir ini rata-rata bisa mencapai Rp. 750.000,- setiap harinya. Dengan melihat begitu besarnya pemasukan dari pengelolaan parkir, dapat dibayangkan berapa banyak tamu yang datang di lokalisasi dan ramainya situasi karena banyak tempat/bordil membunyikan music dengan kerasnya diiringi sendaugurau dari para penghuninya.

Dengan ditutupnya lokalisasi, suasana sekarang sudah terbalik, dimana tidak ada satupun tempat/bordil yang membunyikan music secara keras, karaoke tidak ada lagi dan para tamupun sudah jarang datang ke lokalisasi. Apabila masih ada tamu yang datang ke lokalisasi melakukan transaksi prostitusi, maka ketika terkena razia oleh para petugas terkait tidak akan terlepas dari jeratan hukum yang berlaku. Solusi yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Jambi yaitu dengan memberikan keterampilan kerja, sehingga dapat beralih profesi yang diharapkan memperoleh pekerjaan yang dapat lebih menjamin terhadap kehidupan dimasa mendatang.

Salon Kecantikan

Seperti halnya sebagai seorang pekerja salon, dengan ditutupnya lokalisasi maka

penghasilan mereka terus mengalami penurunan secara drastis. Biasanya banyak para PSK yang minta bantuan untuk menghias diri di salon, sekarang jumlahnya sudah banyak mengalami penurunan bahkan untuk setiap harinya belum tentu ada yang masuk ke salon. Agar pekerja di salon ini dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, maka solusi yang perlu dilakukan yaitu dengan alih profesi dengan diberi peningkatan keterampilan yang telah dimiliki ataupun keahlian tertentu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pedagang Asongan

Pedagang asongan yang seringkali menawarkan dagangan di lingkungan lokalisasi juga terkena dampaknya. Di samping melayani pembelian secara tunai, para pedagang asongan ini juga melayani secara kredit atau angsuran sehingga banyak diburu oleh para penghuni lokalisasi. Biasanya sebelum lokalisasi ditutup, dagangannya yang berupa peralatan rumah tangga, perlengkapan mandi, parfum, asesoris, dan barang lainnya cukup laris dibeli oleh penghuni dan para tamu di lokalisasi sekarang menjadi sepi pembeli. Para pedagang asongan merasa terpuak dengan ditutupnya lokalisasi, karena tidak mendapat pemasukan lagi dari aktivitas sebagai pedagang asongan ini.

Penanganan terhadap berbagai pihak yang terkena dampak akibat ditutupnya lokalisasi baik di Payo Sigadung maupun Langit Biru seperti: tukang parkir, tukang ojek, keamanan, salon kecantikan, usaha warung, tukang cuci pakaian, pedagang asongan dan lainnya sebenarnya merupakan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Jambi, namun sampai saat ini belum dapat terealisasi karena berbagai faktor.

Sebelum dilakukan penutupan di kedua lokalisasi, terlebih dahulu diadakan sosialisasi mengenai rencana tersebut agar berbagai pihak yang terkait dan terlibat dapat menyiapkan diri secara matang. Sebagian besar mereka yang terkait merasa keberatan apabila dilakukan penutupan dalam waktu dekat, mereka menginginkan agar ditunda terlebih dahulu (dua tahun) untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis (mental), sosial, dan ekonomi sehingga sampai betul-betul merasa siap untuk kembali

ke masyarakat. Namun karena sudah menjadi komitmen dari pemerintah daerah, maka ditutuplah dua lokalisasi (Langit Biru dan Payo Sigadung) secara resmi pada tanggal 13 Oktober 2014.

Penutupan lokalisasi terkesan terburu-buru sehingga kurang terencana dalam melakukan penanganan terhadap berbagai dampak yang muncul karena ditutupnya lokalisasi. Para eks PSK yang dipulangkan ke daerah asal (terutama yang berasal dari daerah Kota Jambi) masing-masing memperoleh bantuan sosial berupa dana kompensasi sebesar Rp. 4.800.000,-. Dana kompensasi tersebut diharapkan dapat dipakai sebagai modal usaha dan biaya hidup selama tiga bulan, namun karena tanpa dibekali dengan keterampilan usaha ataupun kerja, sehingga habis untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Sebelum dilakukan penutupan di kedua lokalisasi, para PSK dan geromo/mucikari tidak diberi keterampilan untuk bekal usaha maupun bekerja sehingga mereka tidak bisa alih profesi dengan membuka usaha ataupun bekerja sesuai dengan jenis keterampilannya. Dengan kondisi yang demikian, tidak sedikit para PSK yang tetap bertahan berprofesi sebagai penjaja seks baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada juga beberapa PSK yang menerima para pelanggan melalui online, bekerja di rumah panti pijat plus-plus, warung remang-remang, tempat diskotik, hotel kelas melati, tempat karaoke, dan tempat lokalisasi walaupun secara resmi telah ditutup namun masih ada juga yang menerima tamunya secara sembunyi-sembunyi.

Penutupan lokalisasi di Langit Biru dan Payo Sigadung yang berada di Kota Jambi merupakan ide awal dari Pemerintah Daerah Kota Jambi (Walikota Jambi) dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai satu tahun sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 16 Februari 2014. Dengan ditutupnya dua lokalisasi tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014, paling tidak sebanyak 319 eks PSK (39 orang di lokalisasi Langit Biru dan 280 orang di lokalisasi Payo Sigadung) dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Pemulangan

ke daerah asal bagi eks PSK yang berasal dari luar daerah Jambi sebanyak 22 orang, meliputi: Palembang, Lampung, Bandung, Bogor, Cirebon, Panerokan, Cikampek, Banten, Tasikmalaya, Indramayu, dan Subang.

Sedangkan yang lainnya merupakan PSK yang berasal dari daerah Kota Jambi dan sekitarnya. Pada tahun 2015, Yayasan Sahabat diberi kewenangan dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendistribusian dana bantuan sosial berupa UEP bagi para eks PSK. Setelah dilakukan pendataan oleh Yayasan Sahabat, berhasil mengumpulkan sebanyak 200 orang wanita pekerja seks komersial (dari lokalisasi sebanyak 60 orang dan dari luar lokalisasi sebanyak 140 orang). Wanita pekerja seks komersial luar lokalisasi berasal dari berbagai tempat dan lokasi, seperti: tempat karaoke, hotel kelas melati, prostitusi *on line*, tempat pijat plus-plus, warung remang-remang, dan tempat diskotik.

Dari sebanyak 200 orang, semuanya memperoleh bantuan dana sosial untuk UEP sebesar Rp. 5.000.000,-. Uang sebesar itu oleh eks PSK sebagian besar dipergunakan untuk membeli peralatan membuka usaha berupa: warung minuman air tebu, mie ayam, soto, bakso, berbagai aneka minuman, rokok, dan sembako. Kadang di antara mereka, dana sosial sebesar itu tidak cukup untuk membeli peralatan usaha, sehingga harus punya dana tambahan untuk membeli peralatan seperti press tebu yang harganya mencapai Rp. 10.000.000,-. Tempat usaha atau pada gerobak mereka sebagai penerima dana sosial UEP selalu dipasang stiker bertuliskan "Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui Usaha Kemandirian (APBN-P) Kementerian Sosial RI Tahun 2015". Sebagian besar mereka membuka usaha di pinggir jalan dekat jembatan penyeberangan Sungai Batanghari, dimana selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang sedang menikmati indahnya jembatan penyeberangan di waktu malam, sehingga selalu ramai pada sore dan malam hari, terutama sekali pada malam liburan.

Peran instansi pemerintah yang terkait dalam penutupan lokalisasi ini meliputi Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi.

Kementerian Sosial berperan sebagai pemberi program bantuan sosial berupa dana kompensasi, Dinas Sosial Provinsi Jambi berperan menangani para germo atau mucikari untuk diberdayakan atau alih profesi dengan diberi keterampilan maupun usaha, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi berperan untuk menangani kepada berbagai pihak yang terdampak dengan penutupan lokalisasi. Dari ketiga peran instansi pemerintah terkait, baru Kementerian Sosial berupa dana kompensasi yang sudah terealisasi, sedangkan yang lainnya yaitu dari Dinas Sosial Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Jambi belum terlaksana.

Sebagai terdampak secara langsung terhadap ditutupnya lokalisasi di Kota Jambi yaitu para pekerja seks komersial (PSK) dan germo atau mucikari. Sebagian para PSK (22 orang) telah dikembalikan ke daerah asal (Lampung dan di beberapa kota/kabupaten di Pulau Jawa) dengan menerima uang atau dana kompensasi sebesar Rp. 4.800.000,-. Sedangkan yang berasal dari daerah Kota Jambi dan sekitarnya setelah menerima dana kompensasi, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha warungnya. Sebagian besar dana kompensasi tersebut habis dipergunakan untuk membayar utang-utangnya, membayar sewa rumah ataupun tempat kos, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan membiayai kebutuhan sekolah anaknya.

Ada beberapa pihak yang secara tidak langsung terdampak terhadap ditutupnya lokalisasi, seperti: germo atau mucikari, juru parkir, tukang ojek, usaha warung makan/minum, warung sembako, salon kecantikan, pihak keamanan, tukang cuci, pedagang asongan, tukang pijat, dan aparat pemerintah daerah setempat. Di antara mereka ada yang masih bertahan di tempat lokalisasi walaupun pendapatan dan penghasilannya jauh menurun secara drastis bila dibandingkan dengan sebelum lokalisasi ditutup, seperti: germo/mucikari, pemilik warung makan dan minum, warung sembako, salon kecantikan, tukang pijat, dan tukang cuci. Sedangkan yang sudah menyatakan alih profesi dan tidak lagi bertempat di lokalisasi adalah petugas keamanan yang ditarik menjadi security di salah satu kantor

pemerintah daerah Kota Jambi dan tukang ojek yang pindah ke tempat lain karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan jasanya.

Dari beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak dengan ditutupnya lokalisasi di Kota Jambi, pihak lain yang terdampak yaitu pemerintah daerah setempat (RT) karena kehilangan sumber dana yang jumlahnya tidak sedikit. Selama lokalisasi masih beroperasi, pihak ketua RT tidak begitu sulit mengumpulkan uang atau dana untuk membangun daerahnya, namun setelah lokalisasi ditutup mereka belum bisa menemukan sumber dana lain yang dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan di daerahnya. Dana yang diperoleh dari pengelola lokalisasi selama ini biasanya dipergunakan untuk membangun dan merawat jalan kampung, penerangan jalan, kebersihan lingkungan, keamanan kampung, membangun dan merawat fasilitas kampung, serta dipergunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat kampung

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditutupnya lokalisasi WTS di Kota Jambi berdampak terhadap para pekerja seks komersial, germo/mucikari, dan secara tidak langsung terhadap berbagai pihak, seperti: pemilik warung makan dan minuman, tukang parkir, tukang ojek, pihak keamanan, usaha pencucian/loundry, pedagang asongan, jasa pijat, dan pemerintah daerah setempat. Dampak penutupan lokalisasi WTS dapat diminimalisir apabila rencana penutupan tersebut dipersiapkan secara matang dan terorganisir dari berbagai pihak yang terlibat.

Karena tanpa adanya pembekalan baik keterampilan kerja maupun usaha terhadap para pekerja seks komersial, walaupun mereka diberi dana kompensasi yang besarnya Rp. 4.800.000,- mereka tidak dapat memanfaatkan dana tersebut secara maksimal. Harapan agar dana kompensasi dapat dipergunakan untuk membuka usaha atau alih profesi dan dapat hidup di masyarakat secara wajar, ternyata habis untuk membayar pinjaman, membayar kontrak/kos rumah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi tersebut,

tidak sedikit para pekerja seks komersial (PSK/WTS) tetap mempertahankan profesinya walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas para eks PSK ini dapat dilihat di tempat lokalisasi yang telah ditutup, tempat diskotik, karaoke, hotel kelas melati, panti pijat plus-plus, dan di warung remang-remang. Setelah dilakukan pendataan oleh Yayasan Sahabat, ternyata tidak sedikit para pekerja seks komersial yang melakukan aktivitas prostitusi di luar lokalisasi, yaitu sebanyak 160 orang dengan memperoleh bantuan sosial UEP dari Kementerian Sosial masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-. Apabila usaha ini berhasil, berikutnya Yayasan Sahabat akan mengajukan permohonan berupa proposal kepada Kementerian Sosial untuk memperoleh bantuan sosial yang sifatnya untuk pengembangan usaha sehingga betul-betul dapat hidup secara mandiri.

Para germo/mucikari yang akan diberdayakan dengan diberi keterampilan agar dapat beralih profesi namun belum juga terealisasi tidak dapat berbuat banyak, kecuali tetap membuka rumah bordil untuk disewakan bagi mereka yang membutuhkan untuk perbuatan prostitusi. Seperti di lokalisasi Langit Biru, dimana sering disewa oleh orang dari luar daerah bahkan anak sekolah dengan masih mempergunakan seragam memanfaatkan tempat tersebut untuk mengadu kasih. Hanya dengan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- yang cukup terjangkau, kebutuhan biologis mereka dapat terpenuhi dibandingkan apabila harus menyewa hotel walaupun kelas melati. Para germo/mucikari tetap membuka usaha tersebut walaupun sudah ditutup, hal ini semata-mata tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdampak lainnya selaku pelaku ekonomi di lingkungan lokalisasi yang selama ini masih membuka usahanya, antara lain: pemilik warung makan dan minuman, usaha loundry, dan pijat. Pendapatan mereka setelah penutupan lokalisasi menurun secara dratis, jarang sekali para penghuni dan tamu yang memanfaatkan dari usaha mereka. Karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka tetap membuka usaha walaupun kondisinya sepi dari pengunjung. Sedangkan terdampak

lainnya seperti tenaga keamanan, tukang parkir, pedagang asongan, dan tukang ojek tetap melakukan pekerjaan yang sama namun di tempat lain.

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Sosialisasi rencana penutupan lokalisasi sebaiknya dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum dilakukan penutupan, dengan harapan agar mereka yang terdampak dapat mempersiapkan diri secara matang. Selain dapat mempersiapkan diri, nantinya akan terjadi diskusi dan diperoleh masukan yang sangat berharga dalam rangka meningkatkan kemandirian mereka setelah dilakukan penutupan.
2. Para pekerja seks komersial, pada umumnya mereka melakukan profesinya disebabkan karena faktor ekonomi dan ditunjang oleh tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya bekal keterampilan baik untuk bekerja maupun dalam bidang usaha dan jasa. Menutup lokalisasi, berarti harus dapat memandirikan para pekerja seks komersial sehingga secara swadaya mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan memanfaatkan bekal keterampilan dan modal usaha yang telah dimiliki. Kemandirian ini dapat berupa pemberian keterampilan kerja sesuai dengan bakat minat dan pasaran yang sedang laku jual. Begitu juga dengan keterampilan usaha yang dipandang belum banyak di pasaran, sehingga dapat memanfaatkan dana kompensasi dengan membuka usaha secara maksimal.
3. Para geromo/mucikari yang ada di lokalisasi Kota Jambi (Payo Sigadung dan Langit Biru) setelah dilakukan penutupan, penanganannya dibebankan kepada Dinas Sosial Provinsi Jambi dengan diberdayakan agar dapat beralih profesi namun belum terealisasi. Pada umumnya para geromo/mucikari ini sudah tidak muda lagi, dalam arti masuk dalam kategori usia kurang produktif. Solusi yang perlu dilakukan yaitu dengan diberdayakan dengan memberi keterampilan dalam berbagai bidang usaha agar mereka dapat beralih profesi pada bidang yang lain.
4. Pelaku kegiatan ekonomi di lingkungan lokalisasi di Kota Jambi yang terdampak akibat ditutupnya lokalisasi dalam penanganannya

dibebankan kepada Dinas Sosial Kota Jambi, karena sesuatu hal upaya ini belum dapat terealisasi. Tindakan yang perlu dilakukan agar mereka dapat beralih profesi yaitu dengan memberikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain beralih profesi, mereka juga dapat melakukan pekerjaan dan usaha yang sama namun di tempat lain. Berbagai instansi terkait yang ada di Kota Jambi dapat memfasilitasi agar mereka yang terdampak dapat beraktivitas secara mandiri. Seperti petugas keamanan beralih jadi petugas security di salah satu instansi pemerintah daerah Kota Jambi, tukang parkir melakukan aktivitas di sekitar pasar atau jalan protokol Kota Jambi, begitu juga tukang ojek tetap melakukan aktivitas sebagai ojek secara *online*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan dan terbitnya artikel ini, khususnya pada: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), sumber data, redaksi, dan mitra bestari.

Daftar Pustaka

- Agoes Moh. Moefad. (2015). *Komunikasi Masyarakat Eks Lokalisasi Pasca Penutupan Dolly*. Jurnal Komunikasi Islam. ISBN 2088-6314 Vol.05 No. 01 Juni 2015 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya - Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia
- Arah Juang. (2014). *Masalah dalam Penutupan Lokalisasi Dolly: Solidaritas untuk Front Pekerja Lokalisasi*. Edisi II Tahun 2014
- Fetry Wuryasti. (2016). *Penutupan Lokalisasi bukan jaminan Entaskan Prostitusi*. Senin, 22 February 2016
- Hartini Retnaningsih. (2014). *Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly*. Info Singkat Vol. VI, No.13/I/P3DI/Julii/2014 (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI))

- Kementerian Sosial cq Direktorat Tuna Sosial (2015). *Dalam rapat koordinasi Nasional Penanganan Gelandangan Pengemis dan Prostitusi (eks WTS)*, sumber <http://rehsos.kemensos.go.id>
- Miskawi dan Matali. (2009). *Peran WTS (Wanita Tuna Susila) dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus pada Lokalisasi Padang Bulan Di Desa Benelan Kidul Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*. Direktorat jendral pendidikanTinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Laily Masrurin Nisa. (2016). *Pekerja Seks Komersial Pasca Ditutupnya Lokalisasi Kremil (Studi Deskriptif Mekanisme Survival Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Kremil TambakAsri Surabaya)*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Nanik, S, Kamto, S, dan Yuliati, Y. (2012). "Fenomena Keberadaan Prostitusi dalam Pandangan Feminisme", *Jurnal Wacana*, Vol. 15, Nomor 4
- OPSI. (2017). *Penutupan Lokalisasi: Apakah merupakan Solusi?*. Diskusi Kultural diselenggarakan pada tanggal 08 Februari 2017 di OPSI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Patnani, M. (1999). *Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan*. *Jurnal Kognisi*. Volume 3 Nomor 2
- Rukmini KusumaAstuti. (2009). *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada
- Setiawan. (2015). "Prostitusi, Bisnis atau Kejahatan". dalam [http://Pikiran Rakyat.com](http://PikiranRakyat.com). diunduh pada tanggal 15 Februari 2015
- Sitepu, A. (2004). "Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya". *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Volume 3. Nomor 3
- Sumber lain:
www.academia.edu/12972280/pro_kontra_lokalisasi_prostitusi
Republika, 17 Februari 2016. Mensos: pemerintah targetkan bebas prostitusi 2019